

Buku Ajar
PENGANTAR METODE PENELITIAN
ADMINISTRASI PUBLIK

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Buku Ajar
PENGANTAR METODE PENELITIAN
ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Dra. Kismartini, M.Si.
Irfan Murtadho Yusuf, S.A.P., MPM.

 **deepublish**

Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**BUKU AJAR
PENGANTAR METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**

Kismartini & Irfan Murtadho Yusuf

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
metamorworks (www.shutterstock.com)
rawpixel.com (www.freepik.com)

Tata Letak :
G.D. Ayu

Proofreader :
Mira Muarifah

Ukuran :
xii, 76 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-6302-6

Cetakan Pertama :
Maret 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2023 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: www.deepublish.co.id

www.penerbitdeepublish.com

E-mail: cs@deepublish.co.id

KATA PENGANTAR PENERBIT

Assalamualaikum, w.r. w.b.

Segala puji kami haturkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa, lantunan selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul ***Buku Ajar Pengantar Metode Penelitian Administrasi Publik***.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Wassalamualaikum, w.r. w.b.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan, tidak saja karena penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang sangat sederhana ini, akan tetapi limpahan dan nikmat-Nya yang tidak ternilai dan tidak dapat dihitung yang diberikan kepada penulis. Buku ini disajikan dengan harapan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya masalah-masalah publik yang membutuhkan penyelesaian.

Buku ajar ***Pengantar Metodologi Penelitian Administrasi Publik*** ini sebagai sebuah pengantar yang ditujukan bagi para mahasiswa dalam disiplin ilmu Administrasi Publik yang sedang menyiapkan proposal penelitian skripsi, tesis ataupun disertasi. Buku ajar ini terdiri dari empat (4) bab atau pokok bahasan. Pokok bahasan **pertama** membahas tentang Perkembangan Studi Administrasi Publik yang terdiri dari subpokok bahasan: 1) Definisi dan tujuan Administrasi Publik, 2) Perkembangan paradigma Administrasi Publik, 3) Manajemen publik, dan 4) Kebijakan publik. Pokok bahasan **kedua** tentang Perkembangan Studi Administrasi Publik terdiri dari subpokok bahasan: 1) Sifat *multidiscipline* dari Administrasi Publik, 2) Pendekatan dalam Administrasi Publik, dan 3) Cakupan bidang penelitian Administrasi Publik. Pokok bahasan **ketiga** tentang Pendekatan Penelitian terdiri dari: 1) Penelitian

kuantitatif, 2) Penelitian kualitatif, dan 3) *Mix method*. Pokok bahasan **keempat** tentang Elemen-Elemen Penting Metodologi Penelitian Administrasi Publik, terdiri dari subpokok bahasan: 1) Pendekatan penelitian, 2) Fokus dan lokus, 3) Variabel dan Indikator (untuk penelitian kuantitatif, 4) Fenomena dan Indikasi (untuk penelitian kualitatif), 5) Hipotesis untuk penelitian kuantitatif (jika diperlukan), 6) Teknik sampling, dan 7) Informan. sedangkan bab **kelima** terkait Sistematika Proposal Penelitian.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih sangat banyak kekurangannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran-saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan buku pada edisi-edisi berikutnya. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi teruntuk pembaca yang sudi memberikan masukan untuk penulisan buku ini.

Semarang, Desember 2022

KATA PENGANTAR PENERBIT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PERKEMBANGAN STUDI ADMINISTRASI	
PUBLIK.....	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Penyajian	2
1.2.1. Definisi dan Tujuan Administrasi Publik	2
1.2.2. Perkembangan Paradigma Administrasi	
Publik.....	2
1.2.3. Manajemen Publik	8
1.2.4. Kebijakan Publik.....	11
1.3. Penutup.....	17
1.3.1. Ringkasan	17
1.3.2. Latihan	18
1.4. Daftar Pustaka	18

BAB II	PENELITIAN DI BIDANG ADMINISTRASI	
	PUBLIK	21
2.1.	Pendahuluan.....	21
2.2.	Penyajian.....	21
	2.2.1. Sifat <i>Multidiscipline</i> dari Penelitian	
	Administrasi Publik.....	21
	2.2.2. Pendekatan dalam Administrasi Publik.....	24
	2.2.3. Cakupan Bidang Penelitian Administrasi	
	Publik.....	27
2.3.	Penutup	32
	2.3.1. Ringkasan.....	32
	2.3.2. Latihan.....	33
2.4.	Daftar Pustaka.....	33
BAB III	PENDEKATAN PENELITIAN	35
3.1.	Pendahuluan.....	35
3.2.	Penyajian.....	35
	3.2.1. Metode Penelitian Administrasi Publik.....	35
	3.2.2. Metode Penelitian Kuantitatif	37
	3.2.3. Metode Penelitian Kualitatif	41
	3.2.4. Mix Method.....	44
3.3.	Penutup	47
	3.3.1. Ringkasan.....	47
	3.3.2. Latihan.....	48
3.4.	Daftar Pustaka.....	48
BAB IV	ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM	
	MEMBUAT BAB METODE PENELITIAN	49
4.1.	Pendahuluan.....	49
4.2.	Penyajian.....	50
	4.2.1. Pendekatan Penelitian.....	50
	4.2.2. Fokus dan Lokus Penelitian.....	51

4.2.3. Variabel dan Indikator Penelitian (Penelitian Kuantitatif).....	52
4.2.4. Jenis Data dan Sumber Data.....	55
4.2.5. Hipotesis untuk Penelitian Kuantitatif (Jika Diperlukan).....	57
4.2.6. Teknik Sampling.....	59
4.2.7. Informan	64
4.2.8. Analisis Data.....	65
4.3. Penutup.....	66
4.3.1. Ringkasan	66
4.3.2. Soal	67
4.4. Daftar Pustaka	67
BAB V SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN.....	69
5.1. Pendahuluan	69
5.2. Penyajian	69
5.2.1. Sistematika Proposal Penelitian Kuantitatif.....	70
5.2.2. Sistematika Proposal Penelitian Kualitatif.....	71
5.2.3. Contoh Sistematika Skripsi	72
BIODATA PENULIS.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pergeseran Paradigma Administrasi Negara.....	5
Tabel 2	Penjabaran Kriteria Evaluasi.....	16
Tabel 3	Perbedaan Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, dan Pendekatan Metode Campuran	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Paradigma Administrasi Publik.....	7
Gambar 2	Hubungan Antardimensi Strategis Administrasi Publik	8
Gambar 3	Hubungan Tujuan Penelitian, Hipotesis Penelitian, Pembatasan Masalah, dan Kesimpulan	58

PERKEMBANGAN STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

1.1. Pendahuluan

Metode penelitian di bidang Administrasi Publik berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu Administrasi Publik, perkembangan metode penelitian tersebut terkait dengan pendekatan penelitian, substansi kajian, teori maupun situs penelitian. Oleh karena itu mengawali tulisan buku ini pada Bab 1 diulas tentang perkembangan studi Administrasi Publik. Secara berturut-turut disajikan definisi dan tujuan Administrasi Publik, perkembangan paradigma Administrasi Publik, manajemen publik dan kebijakan publik.

Setelah membaca bab ini, diharapkan mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan memahami definisi Administrasi Publik dan tujuan Administrasi Publik,
- 2) Mengetahui dan memahami perkembangan paradigma Administrasi Publik,
- 3) Mengetahui dan memahami manajemen publik,
- 4) Mengetahui dan memahami kebijakan publik.

1.2. Penyajian

1.2.1. Definisi dan Tujuan Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan proses pengorganisasian dan pengkoordinasian sumber daya organisasi publik dalam rangka formulasi, implementasi, dan mengelola hasil kebijakan publik (Chandler dan Plano, 1988). Felix A. dan Lloyd Nigro (1984) juga menjelaskan bahwa Administrasi Publik merupakan kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan, swasta maupun perseorangan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Administrasi Publik bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dengan melakukan perbaikan pada segala aspek baik aspek organisasi, aspek sumber daya manusia maupun aspek keuangan (Keban, 2019).

Litchfield dan Waldo (1991) menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah bagaimana setiap badan pemerintahan diorganisasikan dan dikelola yang di dalamnya terdapat manusia-manusia beserta perangkatnya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin guna mencapai tujuan pemerintahan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan seluruh kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa publik.

1.2.2. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik

Administrasi Publik dalam perkembangannya memiliki berbagai pemilahan dalam setiap periodenya. Pada tahun 1887 Woodrow Wilson menjelaskan bahwa lahirnya ilmu Administrasi Publik dibedakan antara politik dan administrasi. Goodnow (1905) menjelaskan bahwa politik adalah tentang bagaimana tujuan negara tersebut dirumuskan, sedangkan administrasi adalah bagaimana mencapai tujuan negara untuk kepentingan masyarakat. Dilihat dari

aktornya maka politik diperankan oleh lembaga politik secara organisasi dan politisi secara individu, sedangkan administrasi diperankan oleh lembaga birokrasi secara organisasi dan birokrat secara individu. Fase pemisahan antara politik dan administrasi ini dikenal dengan sebutan dikotomi politik-administrasi yang kemudian disebut sebagai paradigma pertama dalam Administrasi Publik.

Menurut Vigoda (2002), pasca perang dunia kedua Administrasi Publik dianggap gagal sehingga memunculkan ketidakpercayaan publik. Administrasi Publik dapat menimbulkan gerakan *managerialism* karena berupaya memperbaiki kinerja organisasi publik dalam melayani masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik (Lynn.Jr.2006). Tahun 1980 menjadi puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang ditandai dengan adanya gerakan anti pemerintahan di Inggris yang disebut *Thatcherism* dan di Amerika disebut *Reagonomics*. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah merupakan institusi yang tidak efisien sehingga berdampak pada perekonomian nasional. Gerakan ini berdampak pada dikeluarkannya kebijakan tentang desentralisasi dan privatisasi sektor publik (Steger & Roy, 2010). Setelah peristiwa tersebut muncul paradigma *New Public Management* (NPM) yang mempunyai pandangan bahwa tiga fungsi utama yaitu pengadaan barang dan jasa, mengelola pendapatan, dan membuat regulasi harus dimiliki oleh sebuah organisasi pemerintah. Menjalankan tiga fungsi tersebut, pemerintah dapat melibatkan pihak non pemerintahan dengan pertimbangan profesionalitas dan pencapaian kinerja sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan fungsi tersebut. (Lane, 2000; Batley & Larbi, 2004).

NPM memperlihatkan aksi manajerial organisasi publik dengan berfokus pada inovasi, berorientasi hasil dan masa depan, pengambilan risiko, memprioritaskan kinerja, kompetisi pasar, dan otonomi manajerial (Bellone, 1980). Selang waktu berjalan, mulai diketahui kelemahan dari paradigma ini yaitu pada sisi pemaknaan warga negara dan akuntabilitas. Pemaknaan warga negara merupakan sesuatu yang harus dikritisi karena menjadi bagian penting dalam pelaksanaan NPM (Savoie, 2006). NPM memperlakukan warga negara seperti pelanggan sehingga bentuk pelayanan mengenai kebutuhan barang dan jasa serta mekanisme dalam memperolehnya dibedakan antara satu dengan yang lain. Dalam sebuah negara sebaiknya pemerintahan memosisikan warga negaranya sebagai masyarakat yang berdaulat dalam memperoleh pelayanan publik.

Konsep *New Public Service* (NPS) diperkenalkan oleh Denhart & Denhart (2003) sebagai bentuk kritik dari NPM. Pada konsep NPS dijelaskan bahwa fungsi dan peran pemerintah ialah sebagai pelayan (*server*) bukan sebagai fasilitator pasar (*steering*). Selain itu persoalan akuntabilitas kepada masyarakat yang sering terabaikan di NPM juga lebih ditegaskan dalam NPS bahwa terdapat bentuk akuntabilitas multi-aspek dan tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas pasar. Pelaksanaan warga negara dalam NPS ialah sebagai warga negara yang berharap mendapatkan pelayanan secara adil dan menyeluruh dari negara. Terdapat pergeseran dalam paradigma Administrasi Publik guna mengikuti perkembangan kebutuhan baik organisasi maupun lingkungan itu sendiri. Henry (1995) menjelaskan bahwa pergeseran paradigma Administrasi Publik terbagi menjadi enam periode, yaitu:

- (1) Paradigma 1: Dikotomi politik dan administrasi, 1900–1926.
- (2) Paradigma 2: Prinsip-prinsip administrasi, 1927–1937.

- (3) Paradigma 3: Administrasi Publik sebagai ilmu politik, 1950–1970.
- (4) Paradigma 4: Administrasi Publik sebagai manajemen, 1956–1970.
- (5) Paradigma 5: Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, 1970–sekarang
- (6) Paradigma 6: *Governance*, 1990–sekarang.

Selain itu Hendri juga berpendapat bahwa paradigma Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Denhardt (2003) mengalami pergeseran.

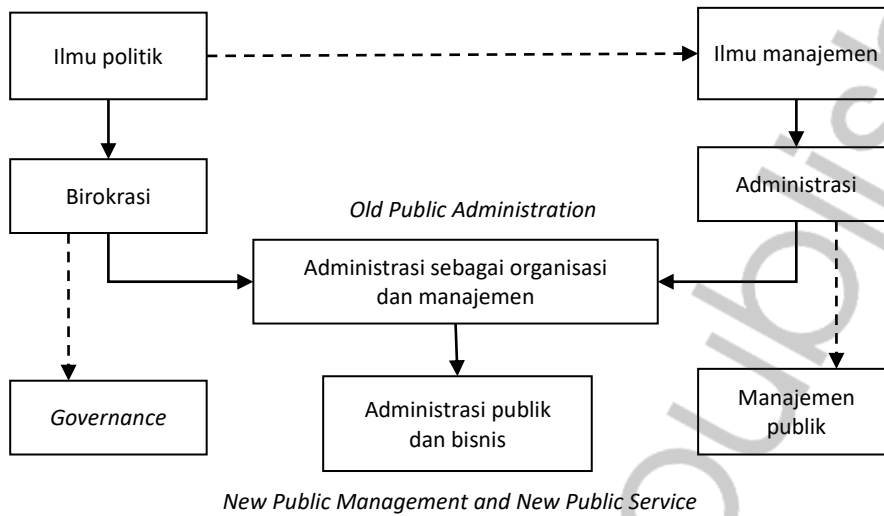
Tabel 1
Pergeseran Paradigma Administrasi Negara

Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
Dasar teoretis dan fondasi epistemologi	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
Responsivitas birokrasi publik	<i>Clients</i> dan <i>constituent</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>
Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
Akuntabilitas	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multi-aspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
Struktur organisasi	Birokratik yang ditandai dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama	Struktur kolaboratif dengan

Aspek	Old Public Administration	New Public Management	New Public Service
		berada pada para agen	kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator	Gaji dan keuntungan, proteksi	Semangat <i>entrepreneur</i>	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003)

Santoso (2008) beranggapan bahwa perkembangan teori Administrasi Publik yang saat ini mengarah pada *governance* memang harus dikembangkan. Cheema dan Rondinelli (2007) menjelaskan pula bahwa *governance* merupakan pendekatan yang paling mutakhir dalam sejarah perkembangan ilmu Administrasi Publik dikarenakan dalam perkembangan keilmuan dan permasalahan yang ada harus diimbangi dengan bentuk kritis dari perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Berikut gambaran perkembangan paradigma Administrasi Publik menurut Santoso (2019).



Gambar 1 Perkembangan Paradigma Administrasi Publik
Sumber: Santoso, 2019

Santoso (2019) menjelaskan bahwa *governance* berkembang dari NPM dan NPS, karena karakteristik *governance* dikembangkan pada praktik NPM dan melalui perkembangan NPS. Prinsip-prinsip *managerialism*, *reinventing government*, *governance*, publik privat *partnership* dan sebagainya adalah istilah yang disebut dalam NPM (Hood, 1995; Osborne and Gaebler, 1992).

Perkembangan paradigma ilmu Administrasi Publik sangatlah dinamis tidak stagnan, dia berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial. Administrasi Publik diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, mengingat kebutuhan publik terus meningkat dan semakin kompleks maka pemerintah secara sendiri tidak mampu untuk memenuhi semua yang dibutuhkan publik. Hal inilah memaksa pemerintahan di berbagai negara untuk beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Kondisi ini pada akhirnya mengubah paradigma ilmu Administrasi Publik untuk berfokus pada tata kelola

Gambar 2 menjelaskan bahwa adanya dimensi manajemen dalam ilmu Administrasi Publik berdampak pada melekatnya pendekatan manajemen di dalam keilmuan Administrasi Publik. Secara komprehensif manajemen didefinisikan sebagai suatu proses untuk merencanakan, mengorganisasi, mengerahkan dan mengawasi seluruh aktivitas anggota organisasi dalam memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya organisasi sebagai upaya mencapai tujuan organisasi. Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan manajemen secara umum dengan manajemen publik. Wilson (1887) menjelaskan bahwa manajemen publik lebih berfokus pada perbaikan fungsi eksekutif dengan perbaikan kualitas personel, aspek organisasi dan metode pemerintahan. Menurut Sangkala (2012) manajemen publik merupakan campuran antara orientasi normatif Administrasi Publik konvensional dengan orientasi instrumental manajemen umum. Mahmudi (2010) menyatakan terdapat 7 (tujuh) ciri khas perbedaan manajemen pada lembaga publik dengan sektor swasta:

- 1) Organisasi publik tidak memutuskan sesuatu berdasarkan atas pilihan individu atau pasar melainkan kolektif di sistem pemerintahan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- 2) Menggerakkan sektor publik berdasarkan pada kebutuhan sumber daya dan harus disediakan oleh sektor publik.
- 3) Menggunakan prinsip transparan dan akuntabel pada publik, sehingga sektor publik ini yang menegaskan bahwa adanya keterbukaan kepada masyarakat sehingga membedakan dengan sektor privat.
- 4) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama yang diberikan oleh organisasi sektor publik.

- 5) Organisasi yang berorientasi pada publik berfokus pada penyelesaian masalah dengan menggunakan prinsip keadilan distributif dalam mewujudkan suatu sistem kesejahteraan sosial, tidak demikian dengan sektor swasta.
- 6) Pada organisasi sektor publik, masyarakat mempunyai kedudukan yang paling tinggi, bukan sebagai pelanggan tetapi warga Negara di mana organisasi mempunyai kewajiban memenuhi hak masyarakat tanpa mereka menuntut kebutuhan tersebut setiap individu.
- 7) Persaingan (kompetisi) sebagai alat untuk menggerakkan pasar adalah ciri dari sektor privat, sedangkan dalam sektor publik pemerintah menggunakan tindakan kolektif sebagai alat untuk bekerja.

Proses manajemen dalam pelaksanaannya pada lembaga publik memiliki kecenderungan untuk memenuhi tujuan organisasi serta orientasi jangka panjangnya adalah untuk mencapai visi misi organisasi (Mahmudi, 2010). Alison dalam Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa terdapat fungsi manajemen yang tidak hanya digunakan di lembaga privat tetapi juga digunakan pada lembaga publik. Fungsi manajemen tersebut adalah:

- 1) Fungsi strategi, yaitu menetapkan tujuan dan prioritas organisasi; membuat perencanaan yang operasional.
- 2) Fungsi manajemen komponen internal, yaitu mengorganisasi dan menyusun staf; mengarahkan manajemen sumber daya manusia; mengendalikan kinerja organisasi.
- 3) Fungsi manajemen konstituen eksternal, yaitu hubungan dengan unit eksternal organisasi; hubungan dengan organisasi lain; hubungan dengan media dan publik.

Manajemen publik berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai suatu proses pengelolaan organisasi publik dengan menggabungkan fungsi manajemen (*planning, organizing, dan controlling*) dengan Sumber Daya Manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di mana pelaksanaannya oleh pemerintah memperhatikan prinsip keadilan distributif dalam kesejahteraan sosial.

1.2.4. Kebijakan Publik

Banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Misalnya, apakah kebijakan dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh Pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya diharapkan oleh masyarakat, dan dapat diramalkan.

Dye (1992) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (*whatever governments choose to do or not to do*). Selanjutnya Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu harus meliputi semua "*tindakan*" pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena "*sesuatu yang tidak dilakukan*" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama

besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah. Gagasan yang serupa dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky (1978) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan "*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.*". Kebijakan publik merupakan apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan.

Anderson (1984) dan Islamy (1994) memaknai kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu persoalan tertentu. Dye (1978) mengemukakan bahwa dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen yaitu (1) kebijakan publik, (2) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Anderson (1984) menjelaskan bahwa dalam kebijakan publik terkandung beberapa elemen yaitu:

- a. Kebijakan selalu memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan ialah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan pengertian dan paparan elemen kebijakan publik yang telah disebutkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan sekadar apa yang ingin dilakukan (Wahab, 1991:13).

Kehidupan kenegaraan modern tidak dapat lepas dari dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan publik sehingga dapat dikatakan bahwa domain atau wilayah studi dari kebijakan publik sangatlah luas. Saat ini studi mengenai kebijakan publik telah mencakup banyak bidang seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan maupun transportasi atau perhubungan. Berbagai kajian mengenai kebijakan publik telah dilakukan oleh para ilmuwan seperti tentang studi kebijakan pemerintah di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Beberapa kajian ini dilakukan dalam rangka memahami kebijakan publik yang dijalankan oleh suatu negara atau dengan kata lain menggunakan studi komparatif.

Lester dan Stewart (2000) menjelaskan bahwa saat ini studi kebijakan telah meliputi berbagai tahapan. Wilayah yang dikaji oleh kebijakan publik sangatlah luas dan tidak hanya terpaku pada lembaga-lembaga formal pemerintah seperti yang dilakukan oleh ilmu politik tradisional. Berdasarkan tahap-tahap kebijakan yang dipaparkan O' Jones (1984) dan beberapa ahli lain maka domain kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan penilaian kebijakan.

Warsito (1997) membagi beberapa pihak yang berminat mengkaji kebijakan publik (analisis kebijakan publik) ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka yang tidak terlibat

dalam permusuhan maupun pelaksanaan kebijakan publik. Kelompok ini melihat analisis kebijakan sebagai alat untuk menyeleksi kebijakan-kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Umumnya kelompok ini berasal dan tinggal di negara-negara demokratis. Kelompok kedua ialah perumus kebijakan publik di mana analisis kebijakan dipandang sebagai sarana atau alat untuk menambah kemampuan para perumus kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang baik. Sedangkan kelompok ketiga ialah dari kelompok ilmuwan yang berminat dalam masalah kebijakan di mana mereka menganggap kebijakan publik sebagai objek studi mereka. Minat utamanya ialah mengembangkan kebijakan publik sebagai cabang ilmu walaupun mungkin mereka menyediakan saran-saran bagi para perumus kebijakan.

Banyak penelitian kebijakan publik setelah tahun 1990 berkembang kepada kajian tentang reformasi kebijakan. Brinkerhoff and Crosby (2002) menyebutnya sebagai generasi ketiga pendekatan analisis kebijakan. Isu utama dari reformasi adalah saling hubungan antara berbagai komponen ekonomi makro, sektoral dan reformasi pemerintah (*governance*). Generasi ketiga melihat reformasi kebijakan sebagai sebuah proses. Implikasinya adalah bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup dengan mendesain kebijakan yang baik tapi dibutuhkan pengelolaan implementasi kebijakan.

Brinkerhoff and Crosby pada tahun 2002 pernah menyampaikan: *A major implication of the third generation of policy analytic approaches is that the policy is a process, then successful policy outcomes depend not simply upon designing good policies but upon managing their implementation* (Brinkerhoff and Crosby, 2002). Kebijakan publik meskipun telah dirumuskan dengan baik (*good Policy*) akan tidak ada artinya jika tidak didukung oleh pengelolaan

implementasi yang baik dan akan menjadi *bad implementation*, dikatakan oleh Bridgman and Davis (2002) sebagai *good policies are meaningless unless implemented*. Oleh karena itu kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapai hasil yang diinginkan memerlukan implementasi yang direncanakan secara benar.

Penelitian implementasi akhirnya berkembang dan sangat diminati oleh para mahasiswa ilmu Administrasi Publik. Apalagi para ahli sudah memberikan *guidance* dengan teori/konsep yang dituangkan dalam model implementasi kebijakan yang menarik, seperti George Edward III (1984); Merilee S. Grindle (1980); Sabatier and Mazmanian (1987); Sabatier (1986) dan lain-lain.

Penelitian kebijakan publik yang banyak ditinggalkan adalah terkait Evaluasi Kebijakan, padahal penelitian evaluasi juga tidak kalah penting seperti penelitian tentang formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan pengusutan secara objektif, teratur, serta empiris terhadap dampak pada program serta kebijakan publik terhadap sasarannya berdasarkan pencapaian tujuan (Parson, 2008). Evaluasi kebijakan diterapkan dalam keseluruhan rangkaian kebijakan, tidak hanya pada tahap akhir kebijakan saja. Evaluasi kebijakan merupakan penilaian terhadap kebijakan atau program dari substansi hingga dampak bagi masyarakat.

Tujuan meneliti evaluasi kebijakan menurut Subarsono (2015)

- a. Menetapkan tingkat kinerja pada kebijakan. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan mampu menjabarkan derajat pencapaian target kebijakan.
- b. Menakar tingkat efisiensi suatu kebijakan. Selain itu, kegiatan evaluasi dapat memperoleh manfaat serta biaya yang terdapat pada sebuah kebijakan;

- c. Menakar *outcome* sebuah kebijakan. Dengan kata lain, evaluasi berguna untuk memberikan ukuran kualitas output atau pengeluaran kebijakan;
- d. Memberikan ukuran dampak kebijakan. Tahap selanjutnya, evaluasi digunakan untuk mengetahui dampak positif dan negatif kebijakan;
- e. Evaluasi berguna untuk melihat kemungkinan sebuah anomali. Dengan kata lain, evaluasi dapat mengetahui kemungkinan penyimpangan dengan cara perbandingan sasaran dan tujuan dengan penerimaan target;
- f. Seumpama input bagi kebijakan di masa depan. Evaluasi memiliki tujuan untuk memberi saran pada proses kebijakan agar output kebijakan menjadi lebih baik.

Perlu diketahui bahwa penelitian evaluasi kebijakan akan dapat memperoleh informasi yang diharapkan apabila peneliti menggunakan kriteria dengan tipe yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. William Dunn (2003:611) menjelaskan kriteria evaluasi sbb.

Tabel 2 Penjabaran Kriteria Evaluasi

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
<i>Effectiveness</i>	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pelayanan
<i>Efficiency</i>	Seberapa banyak upaya yang diperlukan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan?	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat bersih • Unit biaya • Rasio biaya-manfaat
<i>Adequacy</i>	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diharapkan agar dapat mengatasi masalah?	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya tetap (masalah tipe I) • Efektivitas tetap (masalah tipe II)

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
<i>Equity</i>	Apakah manfaat dan biaya disalurkan secara merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria Pareto • Kriteria Rawls • Kriteria Kaldor-Hicks
<i>Responsiveness</i>	Apakah hasil kebijakan memenuhi preferensi, nilai, atau kebutuhan suatu kelompok tertentu?	<ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi dengan survei warga negara
<i>Appropriatenes</i>	Apakah tujuan atau hasil yang diharapkan berguna atau bernilai?	<ul style="list-style-type: none"> • Efisien pada program publik

Sumber: William Dunn (2003)

1.3. Penutup

1.3.1. Ringkasan

Metode penelitian Administrasi Publik berkembang seiring dengan perkembangan ilmu Administrasi Publik. Perkembangan ilmu administrasi publik sangatlah dinamis tidak stagnan, dia berkembang seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial. Administrasi Publik diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik, mengingat kebutuhan publik terus meningkat dan semakin kompleks maka pemerintah secara sendiri tidak mampu untuk memenuhi semua yang dibutuhkan publik. Hal inilah memaksa pemerintahan di berbagai negara untuk beradaptasi dengan tuntutan yang ada. Kondisi ini pada akhirnya mengubah paradigma ilmu Administrasi Publik untuk berfokus pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang selama ini telah dipelajari di berbagai universitas. Sehingga berkembanglah penelitian Administrasi Publik pada dua konsentrasi penelitian yakni kebijakan publik dan manajemen publik.

1.3.2. Latihan

- 1) Jelaskan tujuan diselenggarakannya Administrasi Publik!
- 2) Bagaimana Denhart & Denhart (2003) menjelaskan Konsep *New Public Service* (NPS)
- 3) Sebutkan dan jelaskan 5 elemen dasar dalam pengertian Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Anderson (1984)
- 4) Jelaskan perbedaan *effectiveness* dan *efficiency*!
- 5) Sebutkan kelebihan dan kelemahan dari paradigma NPM!

1.4. Daftar Pustaka

- Anderson, T. W. (1984). *An Introduction to Multivariate Statistical Methods* (2nd ed.). New York: John Wiley
- Batley, R. & Larbi, G. (2004). Working with private partners. Dlm. *The Changing Role of Government: The Reform of Public Services in Developing Countries*.
- Bellone C.J. (1980). *Organization Theory and the New Public Administration*. Allyn and Bacon.
- Bridgman dan Davis (2002). *The Australian Policy Handbook*. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin.
- Brinkerhoff dan Crosby. (2002). *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries*. United States: Kumarian Press.
- Chandler, R.C & J.S. Plano. (1988). *The Public Administration Dictionary*. Second Edition, Santa Barbara, CA:ABC-CLIO Inc.
- Dye, Thomas R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall
- Edwards III, George C; Sharkansky, Ira. (1978). *The Policy Predicament: Making and Implementing Public Policy*/George C. Edwards III, Ira Sharkansky. San Francisco: W.H. Fruman.

- Farazmand, Ali. (2001). 'Global Crisis in Public Service and Administration', in Ali Farazmand (ed.) *Handbook of Crisis and Emergency Management*, pp. 111–130. New York: Marcel Dekker
- Frank J. Goodnow. (1905). *The Principles of the Administrative Law of the United States*. New York: G.P. Putman's Sons.
- Hood, C. (1995), "The 'New Public Management' in the 1980's: variations on a theme". *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 20, No. 2/3, pp. 93-109.
- Islamy. Irfan. (1994). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan VII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Penerbit Gava Media.
- Laurence E.Lynn, Jr., Carolyn J. Heinrich, and Carolyn J. Hill. (2001). *Improving Governance: A New Logic for Empirical Research*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Lester, James P. dan Joseph Stewart. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Edisi Kedua. Australia: Wadsworth.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Nigro, Felix A, and Nigro, Lloyd C. (1977). *Modern Public Administration*. New York: Haper & Row, Publishers.
- O'Jones. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. The University of Michigan.
- Osborne, D. and Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government*. New York, NY
- Sangkala. (2012). *Dimensi-Dimensi Manajemen Public*. Yogyakarta: Ombak.
- Santoso, Pandji. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

- Santoso, D. (2019). *Administrasi Publik–Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Savoei, D.J. (2006). "What is Wrong with the New Public Management?", Otenyo, E.E. and Lind, N.S. (Ed.) *Comparative Public Administration (Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 15)*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley
- Steger, M. B., & Roy, R. K. (2010). *Neoliberalism: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Utomo, Warsito. (1997). Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Tingkat II Masa Orde Baru (Studi Kasus di Dati II Cilacap dan Dati II Kudus). *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*.
- Vigoda, E. (2002). The legacy of public administration. *Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis*. New York: Marcel Dekker, 1-18.
- Wahab, Solichin Abdul. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waldo, Dwight. (1991). *Pengantar Studi Public Administration*. Terjemahan Selamat W. Admosoedarmo. Cetakan keenam. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Wilson, W. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, 2.

PENELITIAN DI BIDANG ADMINISTRASI PUBLIK

2.1. Pendahuluan

Administrasi Publik merupakan ilmu yang bersifat multidisiplin, maka studi Administrasi Publik membuka peluang untuk belajar banyak hal. Peluang karier dari ilmuwan Administrasi Publik juga terbuka luas, dapat disebutkan sebagai berikut: Aparat Pemerintah, Legislatif, Konsultan Pemerintah, Konsultan Publik, Peneliti, Dosen, Jurnalis, dan lain-lain. Pada bab ini dijelaskan beberapa sifat dari ilmu Administrasi Publik, pendekatan dalam Administrasi Publik, cakupan bidang Administrasi Publik. Selanjutnya setelah membaca bab ini, diharapkan mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan memahami sifat penelitian Administrasi Publik
- 2) Mengetahui dan memahami pendekatan dalam Administrasi Publik
- 3) Mengetahui dan memahami cakupan bidang Administrasi Publik

2.2. Penyajian

2.2.1. Sifat *Multidiscipline* dari Penelitian Administrasi Publik

Administrasi Publik sebagai ilmu hadir untuk memecahkan berbagai masalah publik yang bersifat kompleks (Farazmand, 1999).

Masalah publik yang dimaksudkan di sini adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah yang bersifat multi-sektoral yang berkaitan satu dengan lainnya. Beberapa contoh masalah publik seperti kerusakan lingkungan, konservasi energi, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perencanaan kota, mitigasi kebencanaan dan lain-lain adalah masalah yang kompleks dan terkait satu dengan lainnya. Perkembangan teknologi dan peradaban manusia modern dengan sendirinya memunculkan masalah yang semakin rumit dan kompleks.

Pengembangan keilmuan Administrasi Publik dengan pendekatan lintas disiplin sangat bermanfaat untuk mencari solusi terhadap masalah yang kompleks tersebut. Oleh karena itu, para ilmuwan Administrasi Publik menganjurkan perlunya pendekatan multidisiplin bahkan interdisiplin dan transdisiplin dalam pengembangan ilmu maupun riset Administrasi Publik. Berbagai persoalan publik tersebut tentunya tidak mungkin dipecahkan dengan menggunakan satu disiplin ilmu saja, tetapi melalui penggabungan berbagai disiplin ilmu (Ingram et al., 2003).

Pendekatan multidisiplin dan interdisipliner dalam Administrasi Publik menuntut dipakainya berbagai model, pendekatan dan konsep yang menghubungkan atau mengintegrasikan kerangka teoretis dari berbagai disiplin ilmu, menggunakan rancangan dan metodologi yang tidak terbatas pada hanya satu bidang dan memerlukan pemanfaatan sudut pandang dan keterampilan disiplin ilmu yang terlibat melalui beberapa fase proses dalam penelitian (Sujarwoto, 2021). Konsekuensi dari Administrasi Publik sebagai ilmu multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin adalah pendekatan yang digunakan dalam memahami permasalahan Administrasi Publik adalah pendekatan yang sifatnya sistemik dan tidak menggunakan pendekatan yang linier yang

bersifat deterministik. Cara berpikir linear adalah cara berpikir tertib dan mengikuti aturan, satu persatu dan berurutan. Oleh karena itu, cara berpikir linear hanya memiliki satu jawaban benar yaitu jawaban yang mengikuti kaidah yang ditentukan. Sebaliknya pendekatan sistem atau *system thinking* mensyaratkan kita berpikir lateral agar mampu memahami permasalahan dari banyak sudut pandang untuk memperoleh jawaban yang pas dan mengena. Kreativitas diperlukan dalam berpikir lateral untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan yang akan muncul. Dalam hal ini pendekatan sistem adalah upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dengan melakukan analisis hubungan antar elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada dalam sistem.

Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisis terhadap permasalahan tadi, untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya. Bertalanffy (2015) berpendapat bahwa pendekatan sistem penting karena memberikan kepastian objektif dalam menemukan cara memberikan pengertian yang realistis tentang sistem khusus atau kelompok untuk memberikan alternatif penyelesaian dan memberikan pilihan untuk melakukan efisiensi yang terbaik dan menekan biaya dari kegiatan yang jaringan kerja sangat kompleks.

Keutamaan pendekatan sistem adalah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kompleks yang sulit diselesaikan dengan pendekatan lainnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Checkland (1999) bahwa *system thinking* muncul akibat dari reaksi terhadap ketidakmampuan ilmu alam dalam memecahkan permasalahan masyarakat yang kompleks. Lebih lanjut, Manetsch &

Park (1977) berpendapat bahwa untuk permasalahan multidisiplin yang kompleks pendekatan sistem memberikan penyelesaian masalah dengan baik.

2.2.2. Pendekatan dalam Administrasi Publik

Pfiffner & Presthus (1975) mengungkapkan bahwa cakupan studi administrasi lebih luas daripada cakupan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena kerja sama dapat ditemukan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam tataran teori, para ahli mengajukan seperangkat pendekatan yang saling berbeda. Robert Presthus memandang Administrasi Publik sebagai satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan manusia dan barang, yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial kolektif. Guna mencapai tujuan ini, Administrasi Publik melibatkan berbagai cabang ilmu-ilmu sosial.

Pendekatan Administrasi Publik sering kali bersifat legal, historis, dan normatif, namun dalam perjalanan waktu, berbagai pendekatan yang berlaku menurut Presthus, dapat diklasifikasi dalam empat pendekatan, yakni:

a) Pendekatan Institusional (*The Institutional Approach*):

Pendekatan Institusional mungkin pendekatan paling awal untuk Administrasi Publik dapat ditetapkan sebagai pendekatan hukum dan kelembagaan. Sebagian besar didasarkan pada hak dan kewajiban hukum pemerintah, pendekatan ini cenderung menekankan hubungan formal dan pemisahan kekuasaan di antara tiga cabang pemerintahan. Kebijakan dan administrasi sering didikotomisasi, dengan asumsi bahwa peran administrator hampir seluruhnya terbatas pada sekadar melaksanakan kebijakan yang dirancang oleh lengan politik resmi pemerintah.

b) Pendekatan Struktural (*The Structural Approach*)

Titik pandang kedua untuk studi Administrasi Publik disebut pendekatan struktural. Pendekatan yang dipengaruhi oleh manajemen ilmiah dan keberhasilan orang Amerika ini cenderung berfokus pada struktur organisasi dan manajemen pers, ditambah dengan banyak perhatian dengan kontrol hukum finansial administrasi dan administrator. Pendekatan ini kadang-kadang dikritik karena tidak berhubungan dengan administrasi ke lingkungan politiknya dan untuk tidak secara emplas fakta bahwa organisasi terdiri dari manusia dan ketika keputusan dibuat, mereka, dalam analisis terakhir, dijadikan individu. Ada beberapa kecenderungan untuk menegaskan kembali organisasi, bahwa mereka memiliki kehidupan yang berbeda dari kegiatan dan norma para pembagi yang membentuknya.

c) Pendekatan Perilaku (*The Behavioral Approach*)

Pendekatan perilaku cenderung memusatkan masalah metodologi yang sangat kuat, penggunaan analisis survei untuk menentukan realitas organisasi, "dan kepedulian terhadap aspek manusia dalam administrasi dan pengambilan keputusan. Para pendukungnya sering merasa bahwa tidak banyak diketahui tentang proses operasional aktual dalam Administrasi Publik, dan sampai pengetahuan semacam itu menjadi lebih mapan pada tingkat validitas yang lebih tinggi, mungkin terlalu dini untuk dipertimbangkan terutama dengan aspek-aspek normatif yang seharusnya dilakukan oleh Administrasi Publik.

Pendekatan perilaku berusaha untuk membangun generalisasi deskriptif dan analitis tentang organisasi dan administrasi. Seperti semua proses intelektual, ini didasarkan pada asumsi tertentu, termasuk fakta bahwa ada ketertiban dan konsistensi dalam proses administrasi, atau setidaknya dalam tindakan manusia yang diyakini

terletak di pusat Administrasi Publik. Salah satu asumsi normatif adalah bahwa hal itu adalah mungkin untuk membangun ilmu administrasi melalui penelitian yang cermat pada organisasi dan perilaku orang yang bekerja di sana

d) Pendekatan Pasca-perilaku (*The Post-behavioral Approach*)

Pendekatan ini dapat dikarakteristikan sebagai *post-behaviourial*, sangat menarik bagi banyak orang yang tidak puas dengan beberapa ketidakmampuan dan prioritas yang terdistorsi dari sistem pemerintahan yang ada dan sistem ekonomi yang ada. Tentu saja, ia memiliki banyak aspek yang patut dikagumi.

Bahaya yang muncul dari penekanan *post*-perilaku adalah bahwa setiap individu yang diberikan dapat disesatkan sejauh pengaruh ia dapat mengubah struktur sosial dan ekonomi yang ada, dengan menghadiri ketidakpuasan Mereka tidak lagi tidak tertarik dalam pengertian yudisial dari istilah tersebut. Sementara sains dapat secara sistematis menganalisis memahami penilaian normatif, sesuai dengan konsistensi mereka dengan tujuan eksplisit, penggabungan peran analisis dan advokasi adalah masalah yang berbeda. Para cendekiawan pencipta terkadang memainkan peran ini dan juga peran advokat, tetapi mereka tampaknya mampu secara sadar memisahkan peran-peran yang tidak pantas ini. Mengingat tren dunia menuju irasionalitas dan menurunnya otoritas ilmiah, tampaknya patut dipertanyakan beberapa di antaranya menyediakan salah satu dari sedikit yang tersisa dalam masyarakat modern, harus memohon advokasi di bidang Administrasi Publik. Jelas, penyempitan seperti itu tidak berlaku untuk praktisi, konsultan, dan anggota tetapi apakah peran yang sering menjadi salah satu advokasi

Orientasi terkait dengan Administrasi Publik adalah masalah baru dengan hasil kebijakan pemerintah. Sampai sekarang, proses pembuatan kebijakan telah mendapat perhatian lebih ilmiah, meskipun ada. pengecualian. Ini, tentu saja, adalah peran yang berharga dan sesuai untuk analisis yang tidak tertarik. Dalam hal ini, tren saat ini adalah ekstrapolasi dari karya awal Herbert Simon tetapi dengan orientasi konsultatif yang bahkan lebih pragmatis.

2.2.3. Cakupan Bidang Penelitian Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah bidang studi yang memiliki cakupan sangat luas, dan akibatnya seseorang tidak dapat dengan pasti menunjukkan fokus dan ruang lingkup khusus Administrasi Publik. Bidang Administrasi Publik saat ini melampaui lingkaran pemerintah dan mencakup bidang lain (Erunke, 2022). Penelitian Administrasi Publik dapat dikatakan seluas permasalahan sosial yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan publik. Contoh permasalahan publik di antaranya permasalahan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Pertanian, Pariwisata dan lain-lain.

Administrasi Publik tidak memiliki metodologi penelitian yang khusus, cukup memakai metodologi penelitian yang berkembang dalam berbagai bidang ilmu. Atau menggabungkan berbagai metode untuk memperjelas analisis tentang fenomena Administrasi Publik atau fenomena-fenomena sosial lain. Yang penting penelitian Administrasi Publik harus memiliki kontribusi praktis kepada perbaikan sistem pemerintahan dalam memenuhi misi publiknya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat.

Cakupan atau ruang lingkup Administrasi Publik sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dikatakan oleh Chandler & Plano (1988) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks

maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau Administrasi Publik juga semakin kompleks.

Keban (2014) menyampaikan ruang lingkup Administrasi Publik adalah sebagai berikut:

- 1) **Dimensi Kebijakan**, berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan ini sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Menurut Chander dan Plano "kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan, selain itu kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pertahanan".
- 2) **Dimensi Manajemen**, berkenaan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen. Penekanan pada aspek pelaksanaan ini tercermin dari definisi manajemen yang disampaikan oleh Mary Parker yaitu manajemen sebagai suatu " proses pencapaian hasil melalui orang lain" definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting yaitu:
 - a. Manajemen adalah suatu proses kerja sama yang mengandalkan sinergisme.
 - b. Proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh seorang yang berfungsi sebagai manajer atau pimpinan.

c. Kerja sama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya.

- 3) Dimensi Organisasi**, berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama yang ditekankan adalah pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bekerja baik secara vertikal (mulai dari jabatan paling atas sampai paling bawah) maupun secara horizontal (berbagai unit-unit atau bidang-bidang yang dibentuk). Aspek kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau memiliki kompensasi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek yang ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas, dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Dalam kenyataan, keseimbangan antara otoritas dan kemampuan cenderung tidak terjadi sehingga menimbulkan masalah. Dwight Waldo yang tertarik dengan struktur mendefinisikan organisasi sebagai struktur otoritas dan hubungan personal dalam suatu sistem administrasi, sementara Chester Barnard yang cenderung melihat organisasi sebagai suatu sistem, mendefinisikannya sebagai suatu sistem aktivitas yang terkoordinasikan secara sadar, atau sistem kekuatan dua orang atau lebih.
- 4) Dimensi Etika**, dianalogikan dengan sensor di dalam Administrasi Publik. Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi tercapai-tidaknya tujuan Administrasi Publik pada umumnya dan organisasi publik pada khususnya. Aplikasi moral dan etika dalam praktik dapat dilihat dari Kode Etik yang dimiliki

administrator publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada, meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama dan etika moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau bertingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut.

- 5) **Dimensi Lingkungan**, dinamika atau perubahan dimensi internal Administrasi Publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika dan kinerja dalam Administrasi Publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal Administrasi Publik yaitu lingkungan. Pentingnya pengaruh lingkungan tersebut disadari sejak munculnya konsep dan teori tentang ekologi administrasi atau ekologi organisasi atau sejak teridentifikasinya konsep "sistem terbuka" oleh F.E. Emery yang mengakui adanya interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada di luar organisasi atau semua yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (*general environment*) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum dan lingkungan khusus (*specific environment*) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, serikat kerja, asosiasi perdagangan dan kelompok penekan.

Ada dua karakter penting dari lingkungan yaitu *turbulence* dan *munificence*. *Turbulence* berkenaan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil,

sedangkan *munificence* berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Suatu organisasi apabila hendak bertahan hidup atau berkembang harus memperhatikan kedua sisi penting dari lingkungan ini. Organisasi tersebut harus mengamati apakah lingkungan cenderung stabil atau labil agar dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut.

- 6) **Dimensi Kinerja**, pengukuran kinerja instansi pemerintah jarang dilakukan, sementara pengukuran kinerja pegawai masih didasarkan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Standar tersebut telah digunakan dan telah bertahan lama, jarang dievaluasi dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan paradigma dan tuntutan publik. Standar penilaian yang digunakan masih bersifat seragam, dan sering dinilai kurang mengakomodasi variasi-variasi bidang tugas pokok dan fungsi pegawai, misi institusi dan kekhasan dari tingkatan hierarki.

Ada beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penilaian kinerja pegawai. Pertama adalah isu menyangkut kemampuan penilaian dalam mengaitkan kinerja seseorang dengan tujuan, misi, dan visi organisasi, kedua isu tentang kemampuan dan independensi dalam memberi penilaian, ketiga berkenaan dengan kontrol kualitas pengukuran kinerja, keempat adalah tingkat penerimaan penilai dan pihak yang dinilai terhadap alat ukur dan isinya dan kelima adalah spesifikasi tentang apa yang diharapkan dari penilai.

Lingkup penelitian Administrasi Publik sangatlah luas, bisa mencakup Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Birokrasi Publik, Kepemimpinan, Pelayanan Publik, Administrasi Kepegawaian, Kinerja Organisasi dan Etika Administrasi Publik. Bahkan jika kita mengacu kepada perkembangan paradigma administrasi publik terkini, maka lingkup kajian administrasi publik lebih berkembang lagi bergeser kearah studi *governance* yakni proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai *actor/stakeholders* yakni pemerintah, masyarakat, dan *private sector*. Sehingga penelitian-penelitian dengan tema *collaborative governance*, analisis *actor* kebijakan, *sustainable development*, *Public Private Partnership* (PPP) menjadi trend penelitian administrasi publik saat ini.

2.3. Penutup

2.3.1. Ringkasan

Administrasi Publik merupakan ilmu yang memiliki sifat yang eklektik sehingga dalam melakukan penelitian memerlukan keterlibatan interdisiplin ilmu dalam memecahkan permasalahan publik yang semakin kompleks. Administrasi Publik tidak memiliki metodologi penelitian yang khusus, cukup memakai metodologi penelitian yang berkembang dalam berbagai bidang ilmu atau berpeluang untuk menggabungkan berbagai metode untuk memperjelas analisis tentang fenomena Administrasi Publik atau fenomena-fenomena sosial lain. Output yang dicapai adalah memiliki Yang penting penelitian Administrasi Publik harus memiliki kontribusi praktis kepada perbaikan sistem pemerintahan dalam memenuhi misi publiknya yakni memenuhi kebutuhan masyarakat

2.3.2. Latihan

1. Apa perbedaan pendekatan penelitian perilaku dan pasca perilaku?
2. Berikan contoh studi kasus Administrasi Publik dengan latar dimensi kebijakan!
3. Sebutkan ruang lingkup dari Administrasi Publik!
4. Jelaskan maksud dari dimensi lingkungan!
5. Apa perbedaan pendekatan institusional dan pendekatan struktural?

2.4. Daftar Pustaka

- Bertalanffy, L. von. (2015). *General System Theory: Foundations, Development, Applications* (18th ed.). Braziller.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley and Sons.
- Checkland, P. (1999). Systems Thinking, Systems Practice. In: Currie, W.L. and Galliers, B., Eds., *Rethinking Management Information Systems*, Oxford University Press, Oxford, 45-56.
- Erunke, C. E. (2022). *Nature and Scope of Public Administration*.
- Farazmand, A. (1999). *Privatization or Reform? Public Enterprise Management in Transition*. 65(4).
- Ingram, Thomas N., LaForge, R. W., Avila, R. A., Charles H. Schwepker, J., & Williams, M. R. (2003). *Government: A Public Administration*.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga)*. Gava Media.
- Manetsch, T. J., & Park, G. L. (1977). *System Analysis and Simulation with Applications to Economic and Social System* (3rd ed.). Department of Electrical Engineering and System Science. Michigan State University.

- Sujarwoto. (2021). *Kerangka Ilmu (Body of Knowledge) Administrasi Publik dan Aplikasinya dalam Riset* (1st ed.). Universitas Terbuka.
- Pfiffner, J. M., & Presthus, R. (1975). *Public Administration* (6th ed.). Ronald Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Ketiga). Gava Media.

PENDEKATAN PENELITIAN

3.1. Pendahuluan

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti terkait dengan bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian memiliki langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Setelah membaca bab ini, diharapkan mahasiswa dapat:

- 1) Menjelaskan tiga macam Metode Penelitian Administrasi Publik
- 2) Menjelaskan penggunaan Metode Penelitian Kuantitatif
- 3) Menjelaskan penggunaan Metode Penelitian Kualitatif
- 4) Menjelaskan penggunaan Metode Penelitian *Mix Method*

3.2. Penyajian

3.2.1. Metode Penelitian Administrasi Publik

Pada bab sebelumnya telah disinggung bahwa Administrasi Publik merupakan ilmu yang bersifat multidisiplin sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan *basic conceptual theoretic* maupun perkembangan keilmuan dalam menghadapi kehidupan yang sangat dinamis. Secara umum pendekatan penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama ialah pendekatan kualitatif, dan kedua adalah kuantitatif. Pendekatan ini

berkaitan dengan tujuan penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Kedua adalah pendekatan kuantitatif di mana tujuan penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatif. Seiring dengan perkembangan zaman maka pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dikombinasikan sehingga terbentuklah pendekatan campuran (*mix method*) (Hamdi & Ismaryati, 2021).

Menurut Creswell (2010) ciri khas dari masing-masing pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok individu dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
- b. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabelnya.
- c. Penelitian metode campuran (*mix method*) ialah pendekatan yang mengombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.

Pendapat Creswell (2010) menunjukkan bahwa setiap orang dalam menjalani kehidupan memiliki dorongan untuk mengetahui diri dan lingkungannya melalui berbagai cara dan upaya penelitian. Setiap cara ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Dengan menggunakan pilihan cara yang tepat maka harapannya seseorang mampu memuaskan rasa keingintahuannya. Dalam hal ini, pendekatan dan metode penelitian menjadi penentu apakah kesemestian pemuasan keingintahuan tentang diri dan lingkungan itu tercapai atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan memilih pendekatan penelitian akan menentukan kualitas hasil penelitian seseorang.

3.2.2. Metode Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabelnya. Roberts B. Burns (2000) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif dalam metode ilmiah berfungsi sebagai pembangun hukum atau prinsip-prinsip umum dengan asumsi bahwa kenyataan sosial bersifat objektif dan berada di luar diri individu. Metode kuantitatif seringkali disebut dengan istilah nomotetik. Dapat disimpulkan bahwa kata kunci dari pendekatan kuantitatif menurut pendapat Burns ialah objektivitas kenyataan sosial.

Burns (2000) menjelaskan bahwa dalam pendekatan kuantitatif terdapat empat asumsi yang berbeda dari asumsi pendekatan kualitatif. Empat asumsi ini terdiri dari fakta dan data yang memiliki realitas objektif, variabel-variabel yang dapat diukur dan diidentifikasi, peristiwa-peristiwa yang dipandang dari sudut pandang pihak luar atau di luar informan, serta realitas kehidupan yang statis. Tujuan dari penelitian kuantitatif mengarah pada tujuan deskripsi dan eksplanasi atau sering disebut sebagai istilah prediksi, generalisasi, dan penjelasan kausal (sebab-akibat).

Burns (2000) juga menjelaskan beberapa metode penelitian kuantitatif, yaitu:

a. Pengujian dan pengukuran,

Dalam penelitian kuantitatif ada istilah yang dinamakan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian didefinisikan sebagai sebuah kalimat yang mendukung atau menolak hasil penelitian atau permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan. Pada prosesnya, hipotesis ini nantinya akan melewati tahapan pengujian untuk menentukan apakah hipotesis yang sudah dibuat ini diterima atau ditolak.

Kesimpulan dari sebuah penelitian kuantitatif diambil dari hasil pengujian hipotesis dari sebuah sampel penelitian yang dapat berlaku untuk keseluruhan populasi (Hermawan, 2018).

b. Bermula dengan hipotesis dan teori,

Menurut Kuncoro (2009) hipotesis adalah pernyataan peneliti mengenai hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan paling spesifik. Teori merupakan kumpulan proporsi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi (Harmawan, 2018). Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2007). Dikatakan sementara karena jawaban yang dituliskan masih didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan dari data yang dikumpulkan. Dalam penelitian, teori dan hasil penelitian yang sudah ada nantinya akan digunakan untuk mengembangkan berbagai hipotesis yang pada akhirnya akan membentuk suatu pengembangan teori baru. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan meneliti data secara deduktif. Hal ini terjadi karena hipotesis disusun berdasarkan teori yang sudah ada. Teori ini menggambarkan keadaan umum suatu konsep.

c. Deduktif dan eksperimental,

Tanzeh (2011) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berfikir deduktif untuk menurunkan hipotesis kemudian dilakukan pengujian di lapangan kesimpulan. Sedangkan metode eksperimental dalam penelitian kuantitatif adalah penelitian untuk menguji apakah variabel-variabel eksperimen efektif atau tidak. Untuk

mengujinya perlu menggunakan variabel kontrol. Penelitian eksperimen ini menguji hipotesis yang dirumuskan secara ketat. Penelitian eksperimen banyak digunakan dalam bidang eksak dan untuk bidang sosial umumnya menggunakan metode survei eksplanatori, metode deskriptif, dan historis (Suryana, 2010).

d. Manipulasi dan kontrol,

Berkaitan dengan metode eksperimen, salah satu cirinya ialah manipulasi yang berarti bahwa dalam penelitian kuantitatif peneliti memberikan sesuatu kepada subjek penelitian yang berupa variabel bebas sebab peneliti memiliki kebebasan untuk mengubah atau memvariasikan variabel-variabel tersebut. Pemberian variabel ini bertujuan untuk melihat pengaruhnya terhadap sesuatu yang akan terjadi pada subjek (Seniati, Yulianto, Setiade, 2015). Kontrol

e. Analisis statistik,

Analisis statistik terbagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa bermaksud untuk menyusun kesimpulan yang sifatnya umum. Metode analisis deskriptif bisa disajikan dalam bentuk tabel maupun visual seperti histogram, poligon, *ogive*, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel, dan diagram lambang. Penghitungan dapat didasarkan pada ukuran tendensi (mean, median, modus), ukuran letak (kuartil, desil, persentil), dan ukuran penyebaran (standar deviasi, varians, *range*, deviasi kuartil, mean deviasi, dan sebagainya)

2. Statistik inferensial

Berbeda dengan statistik deskriptif yang sifatnya memaparkan data, pada statistik inferensial juga dilakukan penarikan kesimpulan serta penyusunan keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Analisis ini umumnya menggunakan sampel tertentu dari populasi besar untuk kemudian digeneralisasikan terhadap populasi. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis korelasional dan analisis komparasi. Analisis korelasional berfokus pada mencari hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh meneliti tentang hubungan antara jumlah sales dengan volume penjualan perusahaan. Sedangkan analisis komparasi bertujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Sebagai contoh yaitu meneliti perbedaan kualitas pelayanan antara toko A dan B.

f. Pelaporan statistik,

Umumnya data yang didapatkan dari proses pengambilan data sifatnya masih mentah. Perlu adanya upaya agar data yang didapatkan bisa disampaikan dengan komunikatif. Melalui pelaporan statistik inilah data yang dilaporkan nantinya lebih mudah dibaca dan dipahami. Statistik didefinisikan sebagai sekumpulan fakta yang umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram guna menggambarkan suatu kumpulan data yang memiliki makna (Rudini, 2016).

g. Penulisan yang objektif.

Berbeda dengan penelitian kualitatif di mana semakin banyak kontak antara peneliti dengan responden maka semakin bagus. Pada penelitian kuantitatif, kebenaran terletak di luar

kuasa peneliti di mana penelitian harus objektif sehingga peneliti tidak boleh terlibat dengan subjek penelitian. Seringkali peneliti menjaga jarak dengan subjek yang diteliti agar mendapatkan tingkat independensi hasil penelitian. Kelebihan dari penelitian kuantitatif ialah tingginya tingkat objektivitas (Hary Hermawan, 2018).

Kekhasan dari pendekatan kuantitatif dalam hal penggunaan asumsi filosofis menurut Creswell (2010) berupa "klaim-klaim pengetahuan *postpositivis*". Dalam hal penerapan strategi penelitian, kekhasan pendekatan kuantitatif ialah adanya pilihan untuk menerapkan "survei dan eksperimen". Pada konteks penerapan metode penelitian, kekhasan pendekatan kuantitatif adalah "pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan-pendekatan yang *predetermined* (sudah ditentukan sebelumnya), dan data berupa angka-angka". Dalam hal penerapan praktik-praktik penelitian, kekhasan pendekatan kuantitatif mencakup tujuh hal utama yaitu menguji atau memverifikasi teori atau penjelasan, mengidentifikasi variabel-variabel dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian, menggunakan standar-standar validitas dan reliabilitas, mengobservasi dan mengukur informasi secara numerik (angka), menerapkan pendekatan-pendekatan yang bebas bias, serta menerapkan prosedur-prosedur statistik.

3.2.3. Metode Penelitian Kualitatif

Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, selain itu juga membahas tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau

hubungan timbal balik. Beberapa peneliti yang melakukan penelitian kualitatif mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Salah satu hal yang melatarbelakangi seorang peneliti menggunakan penelitian kualitatif ialah keyakinan peneliti berdasarkan penelitiannya terdahulu. Beberapa peneliti yang fokus dalam bidang pengetahuan seperti antropologi, atau yang terkait dengan orientasi filsafat seperti fenomenologi, umumnya disarankan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data.

Alasan lain menggunakan penelitian kualitatif ialah sifat dari persoalan yang diteliti. Pada beberapa bidang studi umumnya lebih tepat bila menggunakan jenis penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang berupaya mengungkap sifat pengalaman seseorang dengan fenomena seperti sakit, berganti agama, atau ketergantungan obat. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui atau baru sedikit. Metode ini mampu membalikkan penjelasan yang kompleks mengenai fenomena yang sukar diungkapkan melalui metode kuantitatif. Peneliti kualitatif umumnya memiliki tingkat kritisme yang lebih dalam melakukan proses penelitian. Tingkat kritisme seorang peneliti kualitatif menjadi faktor penentu dalam menjalankan semua proses penelitian (Bungin, 2008).

Burns (2000) menjelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif selalu disajikan dalam bentuk eksploratif dan deskriptif. Secara lebih rinci tujuan dari penelitian kualitatif ialah interpretasi, kontekstualisasi, dan pemahaman perspektif pihak lain. Burns (2000) juga menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif terdapat tujuh metode yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan dan wawancara tidak terstruktur
- b. Terkonklusi dengan hipotesis dan teori *grounded*;
- c. Induktif dan naturalistik;
- d. Analisis data berdasarkan tema dari deskripsi informan;
- e. Data dilaporkan dalam bahasa informan;
- f. Penulisan deskriptif (*descriptive write-up*).

Setiap pendekatan memiliki kekhasan masing-masing. Secara lebih rinci Creswell (2010) menjelaskan bahwa kekhasan pendekatan kualitatif dalam hal penggunaan asumsi filosofis berupa "klaim-klaim pengetahuan konstruktivitas/advokasi/partisipatoris", sedangkan dalam hal penerapan strategi penelitian, kekhasan pendekatan kualitatif ialah pilihan untuk menerapkan "fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, studi kasus, dan naratif". Terkait dalam hal penerapan metode penelitian, kekhasan pendekatan kualitatif berupa "pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan-pendekatan yang berkembang fleksibel, data tekstual, dan gambar". Pada konteks penerapan praktik-praktik penelitian, kekhasan pendekatan kualitatif meliputi sembilan hal utama yaitu posisi-posisi dia, mengumpulkan massa dari para partisipan, fokus pada satu konsep atau fenomena, membawa nilai-nilai pribadi ke dalam penelitian, meneliti konteks atau *setting* partisipan, memvalidasi akurasi penemuan-penemuan, menginterpretasi data, membuat agenda perubahan atau reformasi, dan berekanan dengan partisipan (Hamdi & Ismaryati, 2021).

3.2.4. Mix Method

Penelitian metode campuran adalah pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Karakteristik dari pendekatan campuran dalam hal penggunaan asumsi filosofis, menurut Creswell (2010) adalah "klaim-klaim pengetahuan pragmatis". Dalam hal penerapan strategi penelitian, kekhasan pendekatan campuran adalah pilihan untuk menerapkan "sekuensial, kongruen, dan transformatif". Pada konteks penerapan metode penelitian, kekhasan pendekatan campuran ialah "pertanyaan-pertanyaan terbuka dan tertutup, pendekatan-pendekatan yang berkembang dinamis (*emerging*) dan sudah ditentukan sebelumnya (*predetermined*) serta analisis data kuantitatif dan kualitatif". Sedangkan dalam hal penerapan praktik-praktik penelitian, karakteristik dari pendekatan campuran mencakup lima hal utama yaitu mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, membuat rasionalisasi atas dicampurnya dua data, menggabungkan data pada tahap-tahap penelitian yang berbeda, menyajikan gambaran visual tentang prosedur-prosedur, serta menerapkan praktik-praktik kuantitatif dan kualitatif (Hamdi & Ismaryati, 2021).

Creswell (2010) menjelaskan bahwa secara lebih ringkas penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami suatu makna. Sementara penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Sedangkan penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Berikut skema pendapat Creswell (2010) mengenai ketiga pendekatan penelitian tersebut:

Tabel 3 Perbedaan Pendekatan Kualitatif, Pendekatan Kuantitatif, dan Pendekatan Metode Campuran

Kecenderungan	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kuantitatif	Pendekatan Metode Campuran
Menggunakan asumsi-asumsi filosofis ini	Klaim-klaim pengetahuan konstruktivis/advokasi / partisipatoris	Klaim-klaim pengetahuan <i>postpositivis</i>	Klaim-klaim pengetahuan pragmatis
Menerapkan strategi-strategi penelitian ini	Fenomenologi, <i>grounded theory</i> , etnografi, studi kasus, dan naratif	Survei dan eksperimen	Sekuensial, kongruen, dan transformatif
Menerapkan metode-metode ini	Pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan-pendekatan yang berkembang dinamis (fleksibel/emerging), data tekstual dan gambar	Pertanyaan-pertanyaan tertutup, pendekatan-pendekatan yang <i>predetermined</i> (sudah ditentukan sebelumnya), data numerik	Pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan tertutup, pendekatan-pendekatan yang berkembang dinamis (<i>emerging</i>) dan sudah ditentukan sebelumnya (<i>predetermined</i>), analisis data kuantitatif dan kualitatif
Menerapkan praktik-praktik penelitian ini	Posisi-posisi mengumpulkan makna dari para partisipan, fokus pada satu konsep atau fenomena, membawa nilai-nilai pribadi ke dalam penelitian, meneliti konteks atau <i>setting</i> partisipan, memvalidasi akurasi penemuan-penemuan, menginterpretasi data, membuat agenda	Menguji atau memverifikasi teori atau penjelasan, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, menghubungkan variabel-variabel dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian, menggunakan standar-standar validitas dan	Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, membuat rasionalisasi atas dicampurnya dua data, menggabungkan data pada tahap-tahap penelitian yang berbeda, menyajikan gambaran visual tentang prosedur-prosedur,

Kecenderungan	Pendekatan Kualitatif	Pendekatan Kuantitatif	Pendekatan Metode Campuran
	perubahan atau reformasi berkolaborasi dengan partisipan	reliabilitas, mengobservasi dan mengukur informasi secara numerik (angka-angka), menerapkan pendekatan-pendekatan yang bebas bias, menerapkan prosedur-prosedur statistik	menerapkan praktik-praktik kuantitatif dan kualitatif.

Pendapat mengenai perbedaan antara pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif dan campuran juga disampaikan oleh Sugiyono (2011). Sugiyono (2011) melihat perbedaan antara penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi berdasarkan sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Dalam konteks sifat realitas, penelitian kuantitatif memandang sifat realitas sebagai "tunggal diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur".

Pada sisi yang lain, Sugiyono (2011) memandang sifat kuantitatif sebagai "independen supaya terbangun objektivitas", sedangkan dalam penelitian kualitatif bersifat "interaktif dengan sumber data supaya memperoleh makna". Sedangkan pada penelitian kombinasi, hubungan ini mencerminkan sifat gabungan, yakni "independen dan interaktif dengan sumber data". Dalam konteks hubungan variabel, Sugiyono (2011) menyatakan bahwa dalam penelitian kuantitatif, hubungan yang terjadi berupa hubungan sebab akibat (kausal) dan dalam penelitian kualitatif berupa hubungan timbal balik/interaktif. Sementara itu, dalam

penelitian kombinasi, hubungan tersebut mencakup keduanya, yakni hubungan sebab akibat dan hubungan interaktif.

Perbedaan ketiga pendekatan penelitian dalam hal aksioma dasar berupa kemungkinan generalisasi. Sugiyono (2011) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif "cenderung membuat generalisasi", penelitian kualitatif melakukan "*transferability* (hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu)" dan penelitian kombinasi dapat melakukan "generalisasi dan *transferability*". Terakhir, dalam hal peranan nilai, Sugiyono (2011) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif "cenderung bebas nilai", penelitian kualitatif "terikat nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data". Dan penelitian kombinasi "bebas dan terikat nilai".

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pendekatannya penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran. Karakteristik dari masing-masing penelitian dapat dipahami dari berbagai perspektif atau kriteria secara detail telah dikemukakan antara lain oleh Creswell, Burn, dan Sugiyono.

3.3. Penutup

3.3.1. Ringkasan

Metode penelitian administrasi memiliki tiga pendekatan yang dapat dibedakan menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran. Karakteristik dari masing-masing penelitian dapat dipahami dari berbagai perspektif atau kriteria secara detail telah dikemukakan antara lain oleh Creswell, Burn, dan Sugiyono.

3.3.2. Latihan

1. Apa yang ada ketahui tentang fakta (realitas) bila dihubungkan dengan permasalahan penelitian?
2. Jelaskan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif!
3. Jelaskan definisi dari hipotesis dalam penelitian!
4. Jelaskan perbedaan hipotesis dan teori!
5. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi dan memahami suatu makna, jelaskan maksud dari eksplorasi tersebut!

3.4. Daftar Pustaka

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (ed.)). Pustaka Setia.
- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Ar-Ruzz Media.
- Al-Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Kerlinger, F. N. (1973). *Founding of Behavior Research*. Holt, Rinchart and Winston Inc. New York.
- Kidder. (1981). *Research Methods in Social Relations*. New York: Rinehart & Winston.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (S. Y. Ratri (ed.)). Alfabeta.

ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM MEMBUAT BAB METODE PENELITIAN

4.1. Pendahuluan

Sistematika penyusunan metode penelitian untuk berbagai bidang ilmu hampir sama, yakni memuat elemen-elemen penting yang dibutuhkan dalam mengoperasionalkan rencana penelitian di lapangan. Pada bab ini disajikan contoh sistematika proposal untuk bidang ilmu Administrasi Publik, di mana di dalamnya juga terdapat susunan metode penelitian. Terdapat sedikit perbedaan konten antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif.

Membuat rancangan/proposal penelitian di bidang Administrasi Publik, peneliti harus memahami metode penelitian secara baik, di mana metode penelitian tersebut disajikan dalam bab tersendiri. Elemen-elemen yang disajikan dalam bab metode penelitian tersebut berbeda antara penelitian kualitatif, kuantitatif maupun *mix method*. Namun pada bab ini disajikan secara umum elemen-elemen penting isi dari bab metode penelitian. Elemen-elemen tersebut mencakup pendekatan penelitian, fokus dan lokus penelitian, variabel dan indikator, fenomena dan indikasi penelitian, hipotesis, teknik sampling, sumber data, informan, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan lain-lain.

Setelah membaca bab ini, diharapkan mahasiswa mampu:

- 1) Memahami pendekatan penelitian dalam Administrasi Publik
- 2) Merumuskan fokus dan lokus penelitian
- 3) Merumuskan variabel dan indikator (pendekatan kuantitatif)
- 4) Merumuskan fenomena dan indikasi penelitian (pendekatan kualitatif)
- 5) Merumuskan hipotesis (pendekatan kuantitatif)
- 6) Membuat teknik sampling
- 7) Menjelaskan sumber data
- 8) Menentukan informan
- 9) Memilih teknik analisis data

4.2. Penyajian

4.2.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi oleh peneliti terkait dengan bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Umumnya pendekatan penelitian terbagi menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan maka kedua pendekatan tersebut dikombinasikan sehingga terbentuklah pendekatan ketiga yang diberi nama pendekatan campuran (*mix method*).

Menurut Creswell (2010) ciri khas dari masing-masing pendekatan tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh beberapa individu atau sekelompok individu dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

- b. Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabelnya.
- c. Penelitian metode campuran (*mix method*) ialah pendekatan yang mengombinasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif.

4.2.2. Fokus dan Lokus Penelitian

1) Fokus Penelitian

Fenomena yang terjadi dalam lapangan bersifat menyeluruh dan tidak mudah untuk diuraikan antara satu dengan yang lainnya khususnya dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, seorang peneliti kualitatif tidak mudah untuk menetapkan rumusan penelitian yang hanya didasarkan pada variabel penelitian. Pada penelitian kualitatif, gejala atau fenomena yang terjadi pada lapangan sifatnya menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti kualitatif tidak dapat menentukan variabel penelitiannya saja. Situasi sosial yang harus ikut diteliti meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*), serta aktivitas (*activity*) yang terkait.

Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa fokus merupakan batasan dalam penelitian kualitatif. Fokus berisikan pokok masalah yang sifatnya masih umum. Menurut Ahmadi (2016) menentukan fokus berguna untuk membangun batasan-batasan dalam studi dan untuk menentukan wilayah inkuiri. Fokus juga berguna untuk menentukan kriteria inklusi-eksklusi bagi informasi-informasi baru yang muncul. Kebaruan informasi yang didapatkan dapat menjadi dasar dalam menentukan fokus penelitian jenis kualitatif.

2) Lokus Penelitian

Lokus penelitian merupakan lokasi di mana masalah penelitian terjadi serta di mana peneliti mendapatkan informasi dari objek yang diteliti. Lokasi ini bisa berupa wilayah tertentu maupun lembaga tertentu dalam masyarakat. Nasution (2003) menjelaskan bahwa lokus atau lokasi penelitian merujuk pada definisi lokasi sosial yang memiliki tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang bisa diobservasi.

Muchtar (2015) mengatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti dapat memperoleh informasi terkait data yang diperlukan. Dalam pemilihan lokasi harus mempertimbangkan keunikan, kemenarikan, serta kesesuaian dengan topik penelitian yang diambil. Dengan adanya pemilihan lokasi ini harapannya peneliti bisa mendapatkan hal-hal yang bermakna dan baru.

4.2.3. Variabel dan Indikator Penelitian (Penelitian Kuantitatif)

Dalam penelitian, variabel merupakan unsur yang penting karena penelitian tanpa variabel tidak akan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Konsep variabel lebih didominasi oleh jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak harus ada variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel ialah konstruk (*construct*) atau sifat yang akan dipelajari seperti tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Kerlinger (1973) juga memaparkan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (*different*

valves). Dapat disimpulkan bahwa variabel merupakan suatu yang bervariasi. Kidder (1981) juga menyatakan bahwa variabel merupakan kualitas (*quality*) ketika peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan. Direktorat Pendidikan Tinggi Depdikbud memaparkan bahwa variabel penelitian ialah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian.

Berdasarkan hubungan antarvariabelnya, macam-macam variabel dalam penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Variabel bebas atau variabel penyebab (*independent variables*) ialah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi serta dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati.
- b. Variabel terikat atau variabel tergantung (*dependent variables*) ialah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
- c. Variabel moderator (variabel dependen kedua) ialah faktor-faktor atau aspek-aspek yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen.
- d. Variabel kontrol ialah variabel yang teridentifikasi sebagai variabel kontrol atau kendali atau variabel yang diusahakan untuk dinetralisasi oleh peneliti. Variabel kontrol berfungsi sebagai kontrol terhadap variabel lain, terutama yang berkaitan dengan variabel moderator dan turut berpengaruh terhadap variabel tergantung.

- e. Variabel *intervening* merupakan variabel yang tidak pernah diamati dan hanya disimpulkan berdasarkan variabel terikat dan bebas. Variabel *intervening* merupakan variabel penyalur atau antara yang terletak di antara variabel independen dan dependen sehingga variabel independen tidak langsung memengaruhi berubahnya variabel satu dan variabel yang lain (Anggara, 2015).

Dilihat dari segi nilainya, variabel dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Variabel diskrit merupakan variabel yang nilai kuantitatifnya berupa bilangan bulat.
- b) Variabel kontinu merupakan variabel yang nilai kuantitatifnya berupa pecahan.

Berdasarkan dengan proses kuantifikasi, variabel dibedakan menjadi 4 yaitu:

- a) Variabel nominal merupakan variabel yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan. Variabel ini bersifat diskret dan saling pilah antara kategori yang satu dan kategori yang lain.
- b) Variabel ordinal merupakan variabel yang disusun berdasarkan jenjang dalam atribut tertentu. Jenjang tertinggi diberi angka 1, jenjang di bawahnya diberi angka 2, lalu di bawahnya diberi angka 3, dan seterusnya.
- c) Variabel interval merupakan variabel yang didapatkan dari pengukuran yang diasumsikan terdapat satuan (unit) pengukuran yang sama.
- d) Variabel ratio merupakan variabel yang dalam kuantifikasinya memiliki nilai nol mutlak.

4.2.4. Jenis Data dan Sumber Data

Pada subbab ini akan membahas jenis data dan sumber data yang dibedakan dua jenis data, yaitu data kualitatif dan kuantitatif.

1) Jenis Data

A. Kualitatif

Pada penelitian kualitatif menyajikan data berupa teks atau kata-kata tertulis yang diperoleh dari peristiwa kehidupan yang memiliki tujuan memahami fenomena yang terjadi seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan sebagainya. Terdapat delapan jenis penelitian kualitatif yaitu etnografi, studi kasus, studi dokumen, pengamatan alami, biografi, fenomenologi, teori dasar, dan studi sejarah.

A) Etnografi

Pendekatan ini berhubungan dengan konsep budaya dengan cara analisis deskripsi atau rekonstruksi dari gambaran dalam budaya dan kelompok (Salim & Syahrums, 2012). Proses penelitiannya sendiri biasanya dilakukan di lapangan dengan durasi cukup lama berbentuk observasi dan wawancara secara organik dengan para partisipan, dan dalam berbagai bentuk kesempatan kegiatan, juga dapat berupa dokumen-dokumen sejarah ataupun benda-benda (artefak).

B) Studi Kasus

Jenis studi kasus dilakukan secara mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dan mendalam dari sebuah entitas.

C) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan sebuah ilmu yang bertumpu pada interpretasi atau analisis bahan tulisan berdasarkan

konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasi, buku, surat kabar, film, catatan harian, artikel, dan sebagainya.

D) Pengamatan Alami

Proses penelitian dengan pendekatan pengamatan alami dilakukan dengan cara observasi menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa adanya perubahan. Tujuan utamanya ialah untuk memahami dan mengamati perilaku seseorang atau kelompok sasaran dalam situasi tertentu.

E) Biografi

Penelitian biografi merupakan kajian tentang individu dan pengalamannya yang dirangkum dalam sebuah tulisan yang berisi interpretasi dari sebuah subjek. Pengalaman ini memiliki unsur-unsur yang sangat menarik. Biografi juga memiliki jenis varian yakni potret, profil, memoar, *life history*, autobiografi, dan buku catatan harian.

B. Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang bersifat numerik atau angka-angka yang secara umum dibedakan menjadi dua meliputi, data diskrit dan data kontinyu. Selain dibedakan menurut kontinuitas, data kuantitatif dapat dibedakan berdasarkan level pengukurannya. Level pengukuran merupakan elemen yang penting karena akan berdampak pada pemberlakuan data tersebut. Dari jenis-jenisnya dapat dibedakan empat jenis:

A) Data Nominal

Nominal merupakan hasil pemberian bukan prosedur dalam pengukuran, artinya angka hanya dijadikan label yang berfungsi sebagai pembeda satu objek dengan objek lainnya.

B) Data Ordinal

Angka ordinal merupakan keterangan untuk penjenjangan kualitatif atau singkatnya adalah sebuah peringkat. Jarak atau *gap* antara dua angka yang berurutan juga selalu sama dan karena itu operasi hitung tambah dan kali juga tidak dapat diterapkan

C) Data Interval

Angka interval pada pokoknya merupakan hasil pengukuran ordinal yang memiliki rentang antar jenjang yang selalu sama. Meskipun dalam urutan 1,2,3 jarak antara 1 dan 2 sama dengan jarak 2 dan 3. Sebagaimana angka ordinal, angka interval juga tidak memiliki nol mutlak, sehingga tidak bisa dikatakan 8 adalah 2 kali 4.

D) Data Rasio

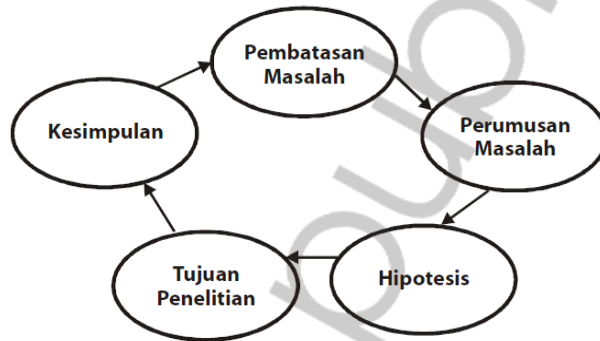
Angka rasio merupakan angka interval yang menempatkan angka nol adalah mutlak. Artinya angka nol dalam skala ini menggambarkan yang diukur merupakan tidak ada pada objek. Ukuran berat, panjang, waktu adalah contoh data pada level rasio.

Secara singkat jenis data penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1

4.2.5. Hipotesis untuk Penelitian Kuantitatif (Jika Diperlukan)

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang umumnya dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan namun belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui pengumpulan data. Hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian namun belum menjadi jawaban yang sifatnya empiris.

Hipotesis merupakan pernyataan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis selalu mengambil bentuk kalimat pertanyaan (*declarative*) dan menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.



Gambar 3 Hubungan Tujuan Penelitian, Hipotesis Penelitian, Pembatasan Masalah, dan Kesimpulan

Penelitian yang menggunakan hipotesis sebagai rumusnya adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif diharapkan menemukan hipotesis untuk kemudian dapat diuji oleh peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitiannya.

Berikut merupakan contoh judul penelitian, paradigma penelitian, rumusan masalah, dan hipotesis yang terbentuk.

a. Judul Penelitian

Hubungan antara gaya kepemimpinan camat dengan prestasi kerja pegawai

b. Paradigma Penelitiannya



X (variabel dependen) = gaya kepemimpinan

Y (variabel independen) = prestasi kerja

c. Rumusan masalah

- 1) seberapa baik gaya kepemimpinan yang ditunjukkan camat? (bagaimana X?)
- 2) seberapa baik prestasi kerja karyawan (bagaimana Y?)
- 3) adakah hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan camat dengan prestasi kerja pegawai? (Adakah hubungan antara X dan Y, butir ini merupakan masalah asosiatif)
- 4) apabila sampel penelitiannya golongan I, II dan III, rumusan masalah komparatifnya adalah:
 - I. adakah perbedaan persepsi antara pegawai golongan I, II, dan III tentang gaya kepemimpinan manajer?
 - II. Adakah perbedaan persepsi antara pegawai golongan I, II, dan III tentang prestasi kerja pegawai?

4.2.6. Teknik Sampling

Sampel merupakan sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti atau dapat dikatakan bahwa sampel mewakili populasinya. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika dalam suatu kondisi peneliti memiliki populasi yang luas maka tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada dalam populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu maka peneliti akan memilih untuk mengambil sampel dari populasi tersebut. Hal yang dipelajari dari sampel yang sudah diambil akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus representatif.

Terdapat 4 (empat) indikator yang mampu menunjukkan bahwa sampel yang diambil sudah representatif, yaitu:

- a. Variabilitas populasi merupakan hal yang sudah "*given*", artinya peneliti harus menerima sebagaimana adanya dan tidak dapat mengatur atau memanipulasinya.
- b. Besar sampel. Semakin besar sampel yang diambil maka semakin tinggi pula taraf representatif dari sampel tersebut. Jika populasinya homogen secara sempurna, besarnya sampel tidak memengaruhi taraf representatif sampel.
- c. Teknik penentuan sampel. Semakin tinggi tingkat acak dalam penentuan sampel maka tingkat representatifnya sampel akan semakin tinggi pula.
- d. Kecermatan memasukkan ciri-ciri populasi dalam sampel. Semakin lengkap ciri-ciri populasi yang dimasukkan dalam sampel maka tingkat representatif sampel akan semakin tinggi pula.

Besarnya sampel dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tipe sampel yang digunakan (sampel sederhana, berstrata, berjenjang, dan lain-lain), spesifikasi hipotesisnya, persentase kemungkinan salah yang diterima, dan biaya (waktu dan uang). Sahya Anggara (2015) menjelaskan bahwa dalam hal pengambilan sampel, terdapat beberapa teknik yang harus diketahui, yaitu:

- a. Proporsional Sampel
Teknik pengambilan proporsional sampel atau sampelimbangan dilakukan untuk menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau sampel wilayah. Jumlah subjek yang ada pada setiap strata atau wilayah tidak sama, untuk mendapatkan sampel yang representatif maka pengambilan subjek dari setiap strata atau wilayah harus seimbang atau

sebanding dengan banyaknya subjek dalam setiap strata atau wilayah (Arikunto, 2007).

Apabila populasi yang ada terdiri dari beberapa subpopulasi yang tidak homogen dan setiap subpopulasi akan diwakilkan dalam penyelidikan maka pada prinsipnya ada dua cara yang dapat diambil, yaitu:

- Mengambil sampel dari setiap subpopulasi tanpa memperhitungkan besar kecilnya subpopulasi.
- Mengambil sampel dari setiap subpopulasi dengan memperhitungkan besar kecilnya subpopulasi.

Implikasi yang dihasilkan dari kedua cara ini berbeda-beda dalam generalisasi. Cara yang kedua disebut *proportional sampling*, dan memberikan landasan generalisasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada cara yang pertama.

b. *Stratified Sample*

Stratified sampling digunakan apabila populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai susunan bertingkat. Pada beberapa penelitian, tidak semua peneliti menghadapi populasi yang utuh homogen tetapi populasi yang menunjukkan adanya strata (lapisan-lapisan) seperti pada sekolah terdiri dari beberapa tingkatan kelas, dalam masyarakat terdapat tingkatan-tingkatan penghasilan.

Setiap stratum harus diwakilkan dalam sampel penyelidikan dan subjek yang ditugaskan dalam setiap sampel diambil dengan teknik tertentu. Alasan menggunakan metode ini ialah untuk meyakinkan bahwa kelompok-kelompok khusus dalam suatu populasi secara memadai diwakilkan dalam sampel dan untuk menambah efisiensi dengan memperoleh kontrol yang lebih besar dalam komposisi sampel.

c. *Purposive Sample*

Teknik penarikan sampel purposif dilakukan dengan memilih sampel dari suatu populasi dan didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini digunakan apabila hanya ada sedikit orang yang memiliki keahlian di bidang yang sedang diteliti.

Dalam *purposive sampling*, pemilihan kelompok subjek didasarkan atas ciri atau sifat tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan karakteristik atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik ini didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan populasi dan informasi tidak perlu diragukan. Peneliti secara intensional hanya mengambil beberapa daerah atau kelompok kunci (*key areas, key groups, or key cluster*); grup, atau *cluster* dalam populasi yang akan diwakili dalam sampel-sampel penyelidikan.

d. *Quota Sample*

Pada teknik ini mulanya populasi disegmentasi dalam subkelompok secara *mutually exclusive* kemudian dinilai untuk memilih subjek atau unit dari masing-masing segmen yang didasarkan pada proposi yang spesifik. Contohnya apabila pengambilan sampel berupa 20 wanita dan 30 pria dengan umur antara 30-45 tahun. Pemilihan responden ini didasarkan pada nonrandom. Oleh karena itu, pemilihan sampel seperti ini dapat bias karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. *Quota sampling* bermanfaat apabila waktu yang dimiliki terbatas, tidak memiliki kerangka sampling, budget riset terbatas, dan akurasi detail tidak penting.

e. *Double Sample*

Sampling kembar (*double sampling*) tepat untuk penelitian yang menggunakan angket. Bagi responden yang sudah mengembalikan daftar angket dikategorikan dalam sampel pertama dan yang tidak mengembalikan dikategorikan dalam sampel kedua. Informasi dari sampel kedua bisa didapatkan melalui jalan wawancara. Informasi yang didapatkan dari sampel pertama disesuaikan dengan informasi yang didapatkan dari sampel kedua untuk menetapkan validitasnya.

f. *Area Probability Sample*

Teknik sampling ini banyak digunakan dalam penelitian sosial termasuk penelitian pendidikan. *Area probability* sampling membagi daerah populasi dalam sub-subdaerah, dan dari sub-subdaerah dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil. Tidak menutup kemungkinan untuk membagi daerah ini ke dalam daerah yang lebih kecil bila memang diperlukan.

g. *Cluster Sample*

Cluster sample digunakan apabila terdapat kelompok alamiah dalam populasi. Populasi keseluruhan dibagi dalam beberapa kelompok atau disebut sebagai kluster dan satu sampel dalam kelompok tersebut kemudian dipilih. Informasi yang dibutuhkan akan dikumpulkan dari semua elemen dalam masing-masing kelompok yang terpilih. Hal ini dilakukan untuk setiap elemen dalam kelompok-kelompok ini atau subsampel dari semua elemen dapat diseleksi melalui masing-masing kelompok tersebut.

Kelemahan dalam menggunakan metode ini ialah terdapat kemungkinan kesalahan yang tinggi dan sulit untuk diukur. Namun di sisi lain teknik ini dianggap ekonomi sebab observasi yang dilakukan terhadap *cluster* atau grup sampel

lebih mudah dan lebih murah daripada observasi terhadap sejumlah individu yang sama, tetapi tempatnya terpecah-pecah (Arikunto, 2007; Sutrisno, 1980).

h. Sampel Random Bertahap (*Random Multistage*)

Cara menarik sampel dengan metode ini ialah menggunakan sampel acak dengan paling sedikit dua tahapan. Kelebihan dari metode ini ialah daftar sampel, identifikasi, dan penomoran yang dibutuhkan hanya untuk para anggota dari unit sampling yang dipilih dalam sampel. Bila unit sampel didefinisikan secara geografis maka akan lebih menghemat biaya. Kekurangannya ialah tingkat kesalahan akan tinggi bila jumlah sampling unit yang dipilih menurun.

i. Sampel Probabilitas Proporsional terhadap Ukuran (*Probability Proportional to Size Sampling*)

4.2.7. Informan

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun pihak lain yang memahami objek penelitian. Bungin (2008) menjelaskan bahwa terdapat dua cara untuk mendapatkan informan penelitian, yaitu melalui (1) *snowballing* sampling dan (2) *key person*.

Teknik *snowballing* sampling digunakan apabila peneliti tidak mengetahui siapa pihak yang memahami informasi objek penelitian sehingga harus melalui beberapa langkah berikut: (1) peneliti ketika memulai penelitian dan pengumpulan informasi berupaya untuk menemukan *gatekeeper* yaitu siapa pun orang pertama yang dapat menerimanya di lokasi objek penelitian serta yang mampu memberi petunjuk mengenai siapa saja yang nantinya dapat diwawancarai atau diobservasi dalam rangka memperoleh informasi tentang objek penelitian; (2) *Gatekeeper* sekaligus menjadi orang pertama yang

diwawancarai, namun tidak menutup kemungkinan untuk *gatekeeper* menunjuk orang lain yang lebih memahami objek penelitian; (3) Setelah wawancara pertama berakhir, peneliti meminta informan untuk menunjuk orang berikutnya yang dapat diwawancarai guna melengkapi informasi yang sudah didapatkan; (4) Tahapan ketiga diulang terus menerus setelah wawancara sehingga peneliti bisa mendapatkan informan selanjutnya yang dapat diwawancarai di lain waktu.

Berbeda dengan teknik *snowballing*, teknik *key person* digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian, sehingga peneliti dapat menemui *key person* untuk memulai wawancara atau observasi. *Key person* ialah tokoh formal atau tokoh informal. Tokoh formal seperti kepala kantor, kepala bagian, kepala unit pemasaran, dan sebagainya. Sedangkan tokoh informal ialah tokoh masyarakat di sekitar kantor atau perusahaan yang memahami tentang objek penelitian.

4.2.8. Analisis Data

Analisis merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat urutan, memanipulasi, dan meningkatkan temuan data agar mudah dibaca. Bagi seorang peneliti, analisis data merupakan media yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Pada pelaksanaannya, analisis data menghasilkan dua kemungkinan, yaitu:

- a. Analisis dapat mendalam dan tajam dalam mengungkapkan dan merumuskan tujuan apabila pelaksanaannya ditunjang dengan segala persiapan yang baik dan lengkap. Selain itu dipengaruhi pula oleh daya nalar dalam mengolah data dan pengetahuan yang memadai.

- b. Analisis memberikan hasil yang kurang maksimal karena terbatasnya daya nalar dan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

Analisis data dilakukan setelah proses klasifikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan dan pengategorian data telah dilakukan. Tahapan awal dalam analisis ialah membagi data atas kelompok kategori atau bagian. Dalam hal ini perlu mempertimbangkan masalah dan tujuan penelitian; lengkap; bebas dan terpisah; berasal dari satu kaidah klasifikasi (Anggara, 2015).

Penelitian dengan pendekatan kualitatif maka metode analisis data berkaitan dengan data yang bersifat numerik, bisa dihitung menggunakan rumus-rumus statistik.

Metode analisis data kuantitatif adalah metode yang digunakan ketika melakukan penelitian berkaitan dengan data numerik. Jenis metode ini memerlukan data bersifat numerik dalam jumlah besar dan bisa dihitung menggunakan rumus-rumus statistika. Penggunaan metode analisis data kuantitatif banyak ditemukan dalam penelitian sains dan teknologi. Pada riset bisnis, metode analisis data kuantitatif juga dapat digunakan misalnya untuk mengetahui tingkat konsumsi pelanggan terhadap produk. Metode analisis data kuantitatif memerlukan kemampuan menghitung secara akurat dan interpretasi data yang rumit.

4.3. Penutup

4.3.1. Ringkasan

Elemen-elemen penting yang perlu diketahui dalam menyusun proposal penelitian Administrasi Publik di antaranya adalah pendekatan penelitian, di mana terbagi menjadi dua yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, namun seiring dengan berkembangnya kebutuhan maka kedua pendekatan

tersebut dikombinasikan sehingga terbentuklah pendekatan yang diberi nama campuran (*mix method*). Selanjutnya adalah fokus dan lokus penelitian, variabel dan indikator penelitian untuk penelitian kuantitatif, fenomena dan indikasi penelitian untuk penelitian kualitatif, merumuskan hipotesis untuk pendekatan kuantitatif, teknik sampling, sumber data, informan dan teknik analisis data.

4.3.2. Soal

1. Jelaskan perbedaan pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan kuantitatif!
2. Bagaimana cara mendapatkan informan dalam penelitian kualitatif?
3. Jelaskan yang dimaksudkan *stratified sampling* dalam pengambilan sampling!
4. Sebutkan teknik jenis-jenis pengambilan sampel!
5. Jelaskan fungsi kajian literatur di dalam penelitian!

4.4. Daftar Pustaka

- Ahmadi, R. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Ar-Ruzz Media.
- Al-Muchtar, Suwama. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani (ed.)). Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Kerlinger, F. N. (1973). *Founding of Behavior Research*. Holt, Rinchart and Winston Inc. New York.
- Kidder. (1981). *Research Methods in Social Relations*. New York: Rinehart & Winston.

- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (S. Y. Ratri (ed.)). Alfabeta.

SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN

5.1. Pendahuluan

Saat mahasiswa akan memulai menulis skripsi atau tesis, langkah pertama adalah menyiapkan proposal. Menyiapkan proposal tentu harus memahami sistematika yang sudah disepakati dari masing-masing program studi. Setiap prodi biasanya memiliki pedoman penulisan karya ilmiah tersebut, para mahasiswa harus memahaminya atau mempelajarinya, supaya tidak terjadi kesalahan penulisan.

Pada bab ini diberikan contoh sistematika proposal penelitian Administrasi Publik, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, di mana pada kedua pendekatan penelitian ini memiliki sedikit perbedaan sistematika.

5.2. Penyajian

Pada sub-bab ini terdapat dua contoh sistematika penulisan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terdapat beberapa perbedaan pada bagian-bagian tertentu dalam sistematika penelitian kuantitatif dan kualitatif.

5.2.1. Sistematika Proposal Penelitian Kuantitatif

I. PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Identifikasi Masalah
- 3) Rumusan Masalah
- 4) Tujuan Penelitian
- 5) Manfaat Penelitian

II. LANDASAN TEORI

- 1) Penelitian Terdahulu
- 2) Kajian Teori yang Relevan
- 3) Kerangka Teori
- 4) Hipotesis Penelitian
- 5) Definisi Konsep
- 6) Definisi Operasional

III. METODE PENELITIAN

- 1) Pendekatan Penelitian
- 2) Variabel Penelitian
- 3) Lokasi Penelitian
- 4) Populasi dan Sampel
- 5) Metode Pengumpulan Data
- 6) Instrumen Penelitian
- 7) Prosedur Penelitian
- 8) Uji Coba Instrumen
- 9) Analisis Data

5.2.2.Sistematika Proposal Penelitian Kualitatif

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Masalah
- 1.2. Identifikasi Masalah
- 1.3. Rumusan Masalah
- 1.4. Tujuan Penelitian
- 1.5. Manfaat Penelitian

II. LANDASAN TEORI

- 2.1. Penelitian Terdahulu
- 2.2. Kajian Teori yang Relevan
- 2.3. Kerangka Pikir Penelitian
- 2.4. Definisi Konsep
- 2.5. Definisi Operasional

III. METODE PENELITIAN

- 3.1. Pendekatan Penelitian
- 3.2. Lokasi Penelitian
- 3.3. Fokus dan Fenomena Penelitian
- 3.4. Subjek Penelitian
- 3.5. Sumber Data
- 3.6. Teknik Pengumpulan Data
- 3.7. Instrumen Penelitian
- 3.8. Uji Coba Instrumen
- 3.9. Analisis Data
- 3.10. Kualitas Data

5.2.3. Contoh Sistematika Skripsi

Halaman Judul

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Kerangka Penelitian
 - 1) Penelitian Terdahulu
 - 2) Administrasi Publik
 - 3) Paradigma Administrasi Publik
 - 4) Kebijakan Publik
 - 5) Kebijakan Pembangunan
 - 6) Konsep Pembangunan Berkelanjutan
 - 7) Wilayah Pesisir
- f. Operasional Konsep
- g. Argumen Penelitian
- h. Metode Penelitian
 - 1) Tipe Penelitian
 - 2) Situs Penelitian
 - 3) Subjek Penelitian
 - 4) Jenis Data
 - 5) Sumber Data
 - 6) Teknik Pengumpulan Data
 - 7) Analisis dan Interpretasi Data
 - 8) Kualitas Data

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Gambaran umum wilayah Tambaklorok
 - 1) Konsep Perancangan Struktur Kawasan
 - 2) Konsep Zonasi dan Penataan Kawasan

3) Konsep Intensitas Pemanfaatan Lahan dan Tata Bangunan

Bab III Hasil Penelitian

- a. Kebijakan Pembangunan Program Kampung Bahari Tambakloro dalam Perspektif *Sustainable Development*
- b. Kendala Kebijakan Pembangunan Program Kampung Bahari

Bab IV Pembahasan

- a. Kebijakan Pembangunan Program Kampung Bahari dalam Perspektif *Sustainable Development*
- b. Kendala Pelaksanaan Program Pembangunan Kampung Bahari Tambaklorok

Bab V Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Daftar Pustaka

BIODATA PENULIS



Dr. Kismartini, M.Si. lahir di Kabupaten Pati Jawa Tengah, adalah dosen pada Program Studi S-1, S-2 dan S-3 Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Menyelesaikan studi S-1 (Sarjana) Ilmu Administrasi Negara di Undip Semarang, S-2 (Magister) Ilmu Perencanaan

Lingkungan di Universitas Indonesia Jakarta, S-3 (Doktoral) Ilmu Administrasi Publik di Universitas Brawijaya Malang.

Berbagai pendidikan & pelatihan telah diikutinya, antara lain: Pelatihan Dosen Analisis Kebijakan (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2005), *Training of Trainers* Paket C1 SCBD Project (Lembaga Administrasi Negara, Jakarta: 2007), *Training Research Methodology* (ICTI–University of Queensland Brisbane Australia: 2011), *Training of Trainers Green Economy* (Temple University, Japan: 2013).

Mendapatkan beberapa sertifikat kompetensi, di antaranya Sertifikat Kompetensi Analis Kebijakan Publik (Lembaga Sertifikasi Profesi LAN Jakarta: 2021), Sertifikasi Kompetensi Staf Rekrutmen dan Seleksi SDM (Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia UNIVERSAL: 2022). Sejumlah karya buku telah

dipublikasikan, di antaranya: 1) *Analisis Kebijakan Publik* (Penerbit Universitas Terbuka: 2010), 2) *Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa* (2014), 3) *Wilayah Pesisir Indonesia dalam Narasi Kebijakan Publik* (Prenadamedia: 2019), *Analisis Kebijakan Publik Kerangka Dasar* (Undip Press: 2019).



Irfan Murtadho Y. lahir pada tanggal 9 Oktober 1995 di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini merupakan dosen tetap non-ASN di Universitas Diponegoro (Undip). Menyelesaikan pendidikan SMA Negeri 2 Semarang tahun 2014, memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik dari Undip tahun 2018, dan memperoleh gelar Magister dengan fokus Ilmu *Public Management* di Universiti Utara Malaysia (2020).

Saat menempuh pendidikan sarjana di Administrasi Publik-FISIP Undip aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan menjabat sebagai sekretaris Bidang Riset dan Kajian Strategis tahun 2015–2016. Sebagai Ketua Pelaksana Pameran Fotografi UKM PRISMA pada tahun 2018. Aktif melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat, salah satunya menjadi anggota tim penelitian terapan unggulan perguruan tinggi sumber dana Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Masyarakat tahun 2020–2022, anggota tim peneliti pengabdian masyarakat dalam advokasi kebijakan relokasi hunian sementara di Kampung Tambakrejo-Kota Semarang tahun 2022 dan terdaftar menjadi dosen KKN Undip Tim I 2022/2023. Terlibat dalam penulisan buku *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* yang terbit tahun 2023, dan beberapa artikel yang pernah ditulis di

antaranya "Analisis Kesesuaian *Beneficiaries* pada Program Bidikmisi di Undip Semarang", "Public Governance Perspective to Adressing Development Problems in Surabaya City", "Penta Helix Model for Sustainable Coastal Area Management in Bangka Islands", "The Role of Collaborative E-Government in Surabaya Intelligent Traffic System: A Case Study of Surabaya, Indonesia".